

Arsip | Direktorat Jenderal Pajak x Inbox (25) - upsusjatim024@gmail.com x WhatsApp x +

efiling.pajak.go.id/arsip

Profil Peraturan Unduh Informasi Publik Internasional

Halo, GUNAWAN

Info

Penyampaian SPT Elektronik
@ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda:

Nama : GUNAWAN
NPWP : 493826313653000 / 3505191612760001
NITKU : 3505191612760001000000
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : 01-12
Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 21/02/2025
Nomor Tanda Terima Elektronik : 95313206312259421631
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Tutup

Daftar SPT

NO	JENIS SPT	TAHUN
1	1770S	2024
2	1770S	2024
3	1770S	2024
4	1770S	2021/01-12

Petunjuk Pengisian

SUMBER AKSI

eFiling Web	Q	📄	📁
eFiling Web	Q	📄	📁
eFiling Web	Q	📄	📁
eFiling Web	Q	📄	📁

Mencari

Ligh... 12:59 21/02/2025



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOLA MARNA LATURAKE
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 794453

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	220.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/7 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	19.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 54P (CAST WHEEL) A/T, SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOTOR, HONDA Y1G02N02L0 A/T (SEPEDA MOTOR SOLO) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA BJ8 W A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.945.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	257.245.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	257.245.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LA HARIMIN
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 495026

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	70.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/122.5 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	30.500.000
1. MOTOR, HONDA MEGA PRO 160.D Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI SATRIA FU 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000		
3. MOTOR, HONDA SCOPY SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	650.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	305.412.320
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	406.562.320

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **406.562.320**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LA ROKA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 261556

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	222.250.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 222.250.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.500.000
1. MOTOR, Yamaha RX King Tahun 2004, HADIAH Rp. 7.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.639.808
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	250.589.808

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 250.589.808

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LA TONGA
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 643014

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.000.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z-CW Tahun 2010, HASIL SENDIRI		
Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	115.246.441
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	117.246.441

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	117.246.441
--	-----	-------------

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Muhammad Yusuf Nurdin
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 251336

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	331.674.716
F. HARTA LAINNYA	Rp.	14.000.000
Sub Total	Rp.	653.874.716

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 653.874.716

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.